

# Strategi Pemerintah Kota Sorong Dalam Mengatasi Tantangan Anak Putus Sekolah

<sup>1</sup>Elsi Salu Limbong, <sup>2</sup>Arie Purnomo, <sup>3</sup>Wahyudin Halik

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sorong  
Koresponden : wahyudin.halik@gmail.com

**ABSTRACT:** *This research aims to find out the strategies used by the Sorong City government in overcoming the challenges of school dropouts and to find out the factors that influence the Sorong City government's strategies in overcoming the challenges of school dropouts. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through interviews. The results showed that the Sorong City Government Strategy in overcoming the challenges of dropping out of school uses five indicators, namely Purpose, Environment, Direction, Action, and Learning. The factors that influence the Sorong City government's strategy in overcoming the challenges of school dropouts consist of internal and external factors. Internal factors are budget limitations in supporting various education programs, program effectiveness that has not been maximized. Differences in the success rate of strategies in different regions and the lack of coordination between agencies. External factors include economic, social, cultural and community factors as well as educational organizations. With a planned strategy and cross-sectoral cooperation, it is expected that the dropout rate in Sorong City can continue to be reduced and the quality of education can be improved.*

**Keywords:** *Strategy, Sorong City Government, School Dropouts*

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah Kota Sorong dalam mengatasi tantangan anak putus sekolah dan faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah Kota Sorong dalam mengatasi tantangan anak putus sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Pemerintah Kota Sorong dalam mengatasi tantangan anak putus sekolah menggunakan lima indikator, yaitu Tujuan, Lingkungan, Pengarahan, Tindakan, dan Pembelajaran. Adapun faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah Kota Sorong dalam mengatasi tantangan anak putus sekolah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu keterbatasan anggaran, efektivitas program yang belum maksimal. kurangnya koordinasi antar instansi. Faktor eksternal yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan masyarakat serta organisasi pendidikan. Dengan strategi yang terencana dan kerja sama lintas sektor, diharapkan angka putus sekolah di Kota Sorong dapat terus ditekan dan kualitas pendidikan meningkat.

**Kata Kunci :** Strategi, Pemerintah Kota Sorong, Anak Putus Sekolah

## PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang dinyatakan dalam pasal 31 ayat (1) UUD tahun 1945, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Selanjutnya, pasal 5 Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sisdiknas menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak atas hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tinggi tanpa memandang status hukum mereka". Sektor pendidikan bertanggung jawab untuk mewujudkan salah satu nilai nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

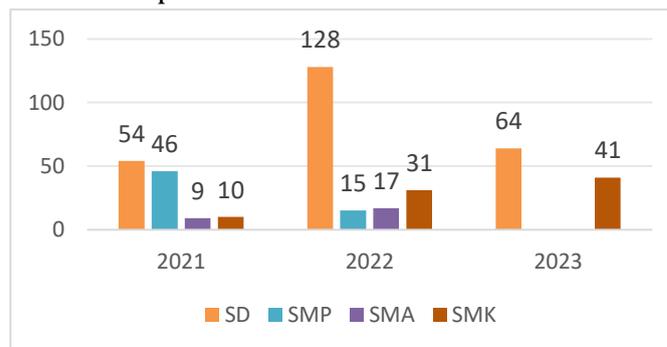
Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008, pemerintah telah menerapkan program wajib belajar selama sembilan tahun untuk

mendukung hal tersebut. Peraturan tersebut menetapkan bahwa program pendidikan minimal untuk warga negara Indonesia adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ sederajat (6 tahun) dan Sekolah Menengah Pertama/SMP/Mts/ sederajat (3 tahun).

Tingkat pendidikan masyarakat terus meningkat, namun tidak semua orang memiliki akses yang sama ke pendidikan (Vega et al., 2024). Banyak kelompok masyarakat yang masih belum memiliki akses yang layak untuk pendidikan. Karena pendidikan adalah hak setiap warga negara tanpa kecuali, tidak dapat dibiarkan jika ada bagian masyarakat yang tidak memiliki akses ke pendidikan. Kondisi ekonomi yang tidak stabil mendukung keadaan bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan. Banyak orang di kelas menengah ke bawah di negara kita mengabaikan pendidikan karena ekonomi yang tidak stabil. Semua orang di negara ini masih merasakan dampak dari krisis ekonomi yang datang bertubi-tubi. Krisis tersebut berdampak paling besar pada masyarakat bawah.

Anak putus sekolah sudah lama ada dalam sejarah pendidikan. Masalah ini sudah menjadi normal dan sulit untuk diselesaikan karena saat berbicara tentang solusi. Meningkatkan sumber daya manusia merupakan langkah pertama menuju peningkatan ekonomi keluarga. Sementara itu, kebijakan pemerintah sangat penting dalam mengatasi segala masalah, termasuk memperbaiki masyarakat, karena semua solusi yang diinginkan bergantung pada kondisi makroekonomi Negara.

**Gambar. 1** Jumlah siswa putus sekolah di Indonesia Tahun 2021-2023



Sumber: Kemendikbud 2024

Berdasarkan data dari Kemendikbud, sepanjang tahun 2021, jumlah siswa putus sekolah di Kota Sorong pada tingkat SD mencapai 54 orang, tingkat SMP 46 orang, tingkat SMA 9 orang, dan SMK 10 orang. Jumlah siswa yang putus sekolah pada tahun 2022 sebanyak 191 orang. Pada tingkat SD berjumlah 128 orang, tingkat SMP 15 orang, tingkat SMA 17 orang, dan tingkat SMK 31 orang, angka putus sekolah tahun ini menunjukkan nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya. Jumlah siswa yang putus sekolah pada tahun 2023 mencapai 105 orang.

Tantangan anak putus sekolah di Kota Sorong adalah masalah yang mendesak dan rumit. Permasalahan ini mempengaruhi sosial-ekonomi kota secara keseluruhan dan pertumbuhan anak secara khusus sehingga menjadi perhatian dan tanggung jawab serius Pemerintah Kota Sorong, DPRD kota sorong dan Majelis Rakyat Papua dalam menangani serta mengatasi permasalahan tersebut. MRP merupakan lembaga representative dan lembaga kultur orang Papua dimana siap bekerja mengawal kebijakan pemerintah dan menyuarakan kepentingan serta hak-hak dasar orang asli Papua menuju kesejahteraan dan kemakmuran yang hakiki sebagaimana diatur dalam undang-undang OTSUS (Korain, F., Kaunang, M., & Egetan, M., 2019)

Mengingat efek jangka panjang yang ditimbulkan oleh putus sekolah, penelitian tentang cara pemerintah menangani masalah anak putus sekolah sangatlah penting. Anak-anak yang putus sekolah cenderung menghadapi banyak masalah di masa depan, seperti kurangnya kesempatan kerja dan peningkatan risiko melakukan kejahatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami masalah ini dan mengembangkan cara yang efektif untuk menyelesaikannya. Selain itu, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang tindakan yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Sorong dan seberapa efektif tindakan tersebut.

Kondisi pendidikan di Kota Sorong menghadapi sejumlah ancaman yang mengganggu kualitas pendidikannya. Sebagian besar masalah ini disebabkan oleh kekurangan guru, fasilitas, dan dukungan orang tua. Pada tahun 2023, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, memiliki 674 siswa yang putus sekolah. Untuk ibukota provinsi, itu bukan angka yang sedikit. (BalleoNEWS, 28 Februari 2023)

Kondisi anak putus sekolah di Kota Sorong masih merupakan masalah yang sangat mendesak yang memerlukan perhatian lebih besar. Banyak faktor yang menyebabkan putus sekolah, mulai dari masalah sosial dan ekonomi hingga kekurangan sarana pendidikan yang memadai. Faktor ekonomi sangat penting, terutama bagi keluarga miskin yang tidak mampu membiayai pendidikan anak mereka. Akses pendidikan yang terbatas juga sangat penting, terutama di daerah pedalaman atau pinggiran kota yang sulit dijangkau oleh transportasi. Adat istiadat dan budaya juga merupakan komponen sosial yang berkontribusi pada kecenderungan anak putus sekolah. Beberapa keluarga mungkin lebih mengutamakan pekerjaan atau tugas rumah tangga daripada mendidik anak-anaknya. Selain itu, banyak orang yang tidak menyadari pentingnya pendidikan formal, terutama di masyarakat tradisional.

## **METODE**

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sering digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, yang dalam konteks ini adalah strategi pemerintahan dalam mengatasi anak putus sekolah. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan

analisis dokumen.

Dalam penelitian kualitatif peneliti akan berbaur menjadi satu dengan yang mereka teliti sehingga peneliti mampu memahami persoalan atau fenomena dari sudut pandang yang mereka teliti. Metode penelitian kualitatif juga lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk digeneralisasikan. (Siyoto dan Sodik, 2015).

Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain. (Kusumastuti, Adhi dan Khoiron,A.M., 2019).

## **HASIL PENELITIAN**

### **Strategi Pemerintah Kota Sorong Dalam Mengatasi Tantangan Anak Putus Sekolah**

Penelitian ini mengacu pada teori Geoff Mulgan (dalam Suprianto, 2023), yang mengidentifikasi strategi pemerintahan melalui lima indikator, yaitu: Purposes (Tujuan), Environment (Lingkungan), Direction (Pengarahan), Action (Tindakan), Learning (Pembelajaran).

#### **Tujuan**

Tujuan merupakan suatu sasaran atau hasil yang ingin dicapai melalui serangkaian tindakan atau kebijakan yang terstruktur dan terencana. Secara konseptual, tujuan berfungsi sebagai arah yang memberikan orientasi terhadap upaya yang dilakukan dalam suatu sistem, baik itu dalam konteks individu, kelompok, organisasi, maupun negara. Tujuan ini memberikan arah yang jelas dan menjadi dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Pemerintah Kota Sorong memiliki strategi untuk mengatasi tantangan anak putus sekolah di Kota Sorong. Tujuan dari strategi pemerintah Kota Sorong adalah untuk mencegah anak putus sekolah, memastikan pendidikan yang layak, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak serta menciptakan sebuah sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas.

#### **Lingkungan**

Konteks lingkungan dalam hal ini terkait keterlibatan berbagai pihak dalam menjalankan strategi ini. Keberhasilan sebuah strategi sangat bergantung pada kerjasama antara sektor publik, swasta, dan masyarakat, yang masing-masing memiliki peran dan kontribusinya untuk mencapainya. Kerjasama antara sektor-sektor ini memperkuat

keberlanjutan kebijakan dan program yang diimplementasikan, serta memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan layak. Keterlibatan semua pihak menciptakan ekosistem yang mendukung pendidikan dan memperkuat fondasi sosial yang diperlukan untuk mengurangi angka putus sekolah di masa depan.

Masyarakat secara umum menunjukkan dukungan terhadap program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi masalah pendidikan, termasuk mengurangi angka anak putus sekolah. Sekolah juga memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan anak putus sekolah. Dalam konteks ini, sekolah tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan pendidikan formal, tetapi juga berperan sebagai lembaga yang proaktif dalam mengidentifikasi dan menangani masalah yang dapat menyebabkan anak putus sekolah.

Namun, meskipun masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi, tantangan utama yang masih dihadapi dalam implementasi program ini terletak pada kurangnya koordinasi yang mendalam antara Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan dalam hal pengumpulan dan pertukaran data terkait anak-anak yang putus sekolah. Saat ini, Dinas Sosial memiliki akses terhadap data anak-anak yang membutuhkan bantuan sosial, sementara Dinas Pendidikan mengelola data terkait kehadiran dan partisipasi anak di sekolah. Namun, masih terdapat kekurangan dalam hal kolaborasi dan sinkronisasi antara kedua dinas ini, yang berakibat pada kurangnya keakuratan dan kelengkapan data anak putus sekolah. Akibatnya, ada kemungkinan bahwa sejumlah anak yang berisiko putus sekolah tidak tercatat dengan baik dalam sistem, sehingga mereka mungkin tidak mendapatkan bantuan atau perhatian yang dibutuhkan untuk tetap melanjutkan pendidikan. Tanpa adanya kerja sama yang lebih erat dan peningkatan koordinasi antara kedua instansi ini, pemantauan dan intervensi terhadap anak-anak tersebut menjadi kurang optimal.

## **Pengarahan**

Pengarahan dalam strategi mengatasi anak putus sekolah adalah langkah untuk memastikan keberhasilan strategi berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Program prioritas yang telah disusun berfungsi sebagai pemandu dalam proses eksekusi, memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil selaras dengan tujuan utama yang ingin dicapai.

Pengarahan yang dilakukan pemerintah dalam strategi mengatasi tantangan anak putus sekolah yaitu dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan mendorong anak putus sekolah untuk ikut PKBM. Pengarahan melalui sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama orang tua dan lingkungan sekitar, mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Hal ini dilakukan melalui berbagai

media, seperti seminar, penyuluhan, diskusi kelompok, serta kampanye di media sosial dan elektronik. Sementara itu, edukasi bertujuan untuk membentuk pola pikir dan kebiasaan yang lebih positif terhadap pendidikan. Edukasi ini dilakukan melalui bimbingan serta pendampingan bagi keluarga yang memiliki anak berisiko putus sekolah. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat tidak hanya memahami pentingnya pendidikan tetapi juga mampu mengambil langkah konkret dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka.

## **Tindakan**

Strategi bukan hanya tentang perencanaan, tetapi juga tentang tindakan nyata yang mengarah pada perubahan dan pencapaian tujuan. Pemerintah menerapkan berbagai tindakan strategis untuk mengatasi masalah anak putus sekolah dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis kebijakan. Tindakan merupakan bentuk nyata dari perencanaan dan komitmen dalam mencapai suatu tujuan. Tanpa tindakan, strategi dan konsep hanya akan menjadi gagasan tanpa realisasi. Aksi nyata menuntut langkah konkret yang dapat diukur, dievaluasi, dan memberikan dampak yang signifikan.

### **a. Mendirikan sekolah untuk daerah yang memiliki akses ke sekolah jauh dan terkendala biaya transportasi**

Pemerintah mengambil tindakan strategis dengan mendirikan sekolah baru di daerah terpencil yang tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Sekolah-sekolah ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan lokal, seperti ketersediaan tenaga pengajar, sarana pembelajaran, dan infrastruktur pendukung lainnya. Tujuan dari pembangunan sekolah ini adalah untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan, sehingga anak-anak di daerah terpencil dapat menerima pendidikan dengan lebih mudah. Mendirikan sekolah di daerah terpencil tidak hanya mengatasi masalah akses, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar lebih dekat dengan rumah mereka. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada transportasi yang mahal dan mengurangi waktu yang terbuang untuk perjalanan.

### **b. Pemberian bantuan PIP untuk masyarakat kurang mampu**

Pemerintah Kota Sorong telah memberikan bantuan PIP, sehingga dapat mengatasi anak putus sekolah karena terkendala biaya. Berdasarkan data dari [pip.dikdasmen.go.id](http://pip.dikdasmen.go.id), tahun 2024 pemerintah Kota Sorong telah menyalurkan bantuan PIP kepada siswa di Kota Sorong sebanyak 26.796 siswa. Penyaluran bantuan merata ke 10 distrik di Kota Sorong dengan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 14.548 siswa, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 6.114 siswa, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 3.782 siswa dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 2.352 siswa.

### **c. Peluncuran Program Pendidikan Gratis disemua Sekolah Negeri**

Pemerintah Kota Sorong resmi meluncurkan Program Sekolah Gratis sebagai upaya

untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya. Program ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya program ini, siswa dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah dapat bersekolah tanpa harus membayar biaya pendidikan. Selain menggratiskan biaya SPP, pemerintah juga menyediakan bantuan berupa perlengkapan sekolah, seperti seragam, buku, dan alat tulis, guna mendukung proses belajar mengajar secara optimal.

Peluncuran program ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu yang sebelumnya menghadapi kesulitan dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka. Selain meringankan beban ekonomi, program ini juga diharapkan dapat menekan angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Sorong. Sebanyak 72 sekolah negeri akan menetapkan kebijakan bebas biaya komite dan SPP. Sekolah-sekolah tersebut terdiri dari 10 TK, 43 SD, 10 SMP, 4 SMA, dan 5 SMK.

Walaupun Pemerintah Kota Sorong telah meluncurkan Program Sekolah Gratis, terdapat pengecualian bagi beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini dikarenakan SMK merupakan sekolah berbasis kejuruan yang memiliki kebutuhan khusus dalam kegiatan praktik yang tidak dapat sepenuhnya ditanggung dalam skema pendidikan gratis. Oleh karena itu, akan ada kebijakan tambahan yang akan dikeluarkan Pemerintah Kota Sorong yang diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa SMK tetap mendapatkan dukungan pendidikan yang memadai, meskipun terdapat kebutuhan khusus dalam kegiatan praktik yang memerlukan biaya operasional lebih besar.

#### **d. Program PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)**

Pemerintah berupaya memfasilitasi anak-anak agar kembali mengenyam pendidikan, salah satunya melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM merupakan program pendidikan nonformal yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak yang putus sekolah agar dapat melanjutkan pendidikan mereka dengan sistem yang lebih fleksibel. Melalui PKBM, peserta didik dapat mengikuti program Kejar Paket A, B, dan C, yang setara dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Sistem pembelajaran dalam PKBM disesuaikan dengan kondisi peserta, sehingga mereka tetap dapat belajar meskipun memiliki kendala waktu atau pekerjaan.

Program ini memastikan bahwa tidak ada alasan bagi anak-anak untuk kehilangan hak belajarnya, karena PKBM memberikan solusi alternatif bagi mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, termasuk

penyediaan fasilitas dan tenaga pengajar yang kompeten, PKBM menjadi salah satu langkah strategis dalam menekan angka putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan bagi semua anak.

## **Pembelajaran**

Dalam konteks organisasi atau pemerintahan, pembelajaran adalah proses berkelanjutan untuk memperbaiki dan menyesuaikan kebijakan seiring dengan pelaksanaan program. Melalui pembelajaran, pemerintah dapat mengevaluasi kinerja kebijakan, menemukan masalah, dan menemukan solusi yang lebih baik (Meysya Ananda Putri, 2024).

Untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan efektif dan efisien, pemerintah menilai implementasi strategi melalui monitoring dan evaluasi yang sistematis. Proses ini melibatkan pengukuran indikator kinerja untuk mengevaluasi seberapa baik strategi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah melakukan analisis dampak terhadap sektor yang menjadi sasaran kebijakan untuk menemukan keuntungan, kesulitan, dan peluang perbaikan.

Selain itu, umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan dikumpulkan melalui laporan, forum diskusi, dan survei dari instansi terkait. Metode ini digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi relevansi dan efektivitas strategi yang diterapkan. Pemerintah dapat melakukan penyesuaian kebijakan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan jika ditemukan hambatan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan fleksibel dan responsif, dan sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat.

Permasalahan anak putus sekolah merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, serta sektor swasta. Namun, tantangan utama terletak pada koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, karena masing-masing pihak bekerja dalam jalur dan mekanisme yang berbeda.

Kurangnya sinergi ini menyebabkan kesenjangan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta distribusi sumber daya. Padahal, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga diperlukan upaya penyatuan visi dan strategi agar setiap pihak dapat berkontribusi secara efektif. Karena itu, memperkuat koordinasi lintas sektor serta membangun mekanisme kolaborasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan menjadi langkah krusial. Dengan demikian, program penanggulangan anak putus sekolah dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih luas bagi keberlanjutan pendidikan.

Dengan memperkuat kolaborasi antar sektor serta mengembangkan sistem koordinasi yang lebih efektif, upaya penanggulangan anak putus sekolah dapat berjalan secara lebih

sistematis, adaptif, dan berkelanjutan, guna memastikan seluruh anak mendapatkan hak pendidikan yang setara dan berkualitas.

## **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Tantangan Anak Putus Sekolah**

### **Faktor Internal**

#### **1. Keterbatasan Anggaran**

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah adalah keterbatasan anggaran dalam mendukung berbagai program pendidikan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah telah mengalokasikan dana untuk pendidikan melalui program seperti beasiswa bagi siswa kurang mampu. Namun, jumlahnya masih belum mencukupi untuk menjangkau seluruh anak yang membutuhkan. Selain itu, masih banyak keluarga yang kesulitan menanggung biaya pendidikan tidak langsung, seperti pembelian seragam, alat tulis, buku, dan biaya transportasi ke sekolah. Keterbatasan dana juga berdampak pada minimnya pembangunan sekolah di daerah terpencil, sehingga akses terhadap pendidikan menjadi lebih sulit bagi anak-anak di wilayah tersebut.

#### **2. Efektivitas Program yang Belum Maksimal**

Meskipun berbagai program telah dirancang untuk mengatasi masalah putus sekolah, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Program seperti PIP dinilai cukup efektif dalam menekan angka putus sekolah, tetapi masih terdapat permasalahan dalam distribusi dan pengawasan dana yang menyebabkan tidak semua siswa mendapatkan manfaatnya secara optimal dan tepat sasaran. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pendampingan kepada orang tua serta siswa mengenai program pendidikan yang tersedia juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas program ini. Pemerintah terus berupaya meningkatkan pembinaan dan pemantauan agar program yang ada dapat berjalan lebih baik di masa mendatang.

#### **3. Kurangnya Koordinasi Antar Instansi**

Penanganan anak putus sekolah memerlukan kerja sama antara berbagai instansi, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan organisasi masyarakat. Namun, koordinasi antara instansi-instansi tersebut masih kurang optimal. Tidak adanya mekanisme komunikasi yang efektif sering kali menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan program serta kurangnya pemantauan yang menyeluruh terhadap anak-anak yang rentan mengalami putus sekolah. Perlu adanya sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait agar strategi yang diterapkan dapat berjalan lebih terarah dan berdampak lebih besar terhadap peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak di Kota Sorong.

## Faktor Eksternal

### a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah di Kota Sorong. Banyak anak yang terpaksa berhenti sekolah untuk membantu perekonomian keluarga, seperti bekerja sebagai buruh, pedagang kecil, atau pekerja serabutan. Kurangnya bantuan ekonomi yang berkelanjutan bagi keluarga kurang mampu juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini. Meskipun terdapat program beasiswa, tidak semua anak dari keluarga miskin dapat mengaksesnya karena berbagai keterbatasan administratif dan kurangnya informasi.

### b. Faktor Sosial

Rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan di kalangan masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan anak-anak putus sekolah. Banyak orang tua yang tidak memiliki pendidikan yang cukup tinggi cenderung tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan anak-anak mereka. Pengaruh lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan pendidikan seorang anak. Tekanan dari teman sebaya, pergaulan yang kurang baik, serta kecenderungan untuk bekerja di usia muda membuat anak-anak lebih rentan untuk keluar dari sekolah.

### c. Faktor Budaya

Dalam beberapa komunitas di Kota Sorong, masih terdapat anggapan bahwa pendidikan bukanlah prioritas utama. Beberapa keluarga masih memiliki pola pikir bahwa anak perempuan lebih baik membantu pekerjaan rumah atau menikah pada usia muda daripada melanjutkan sekolah. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat membuat banyak anak tidak mendapatkan dukungan yang cukup untuk menyelesaikan sekolahnya.

### d. Faktor Masyarakat dan Organisasi Pendidikan

Peran masyarakat dan organisasi pendidikan sangat penting dalam mendukung pemerintah untuk menekan angka putus sekolah. Beberapa organisasi telah berupaya membantu anak-anak putus sekolah melalui program pendataan, pemberian beasiswa, serta penyediaan kelompok-kelompok belajar bagi anak-anak yang membutuhkan. Selain itu, beberapa komunitas masyarakat juga mulai berinisiatif membantu mendirikan sekolah di daerah yang sebelumnya tidak memiliki fasilitas pendidikan.

## KESIMPULAN

Pemerintah Kota Sorong memiliki strategi untuk mengatasi tantangan anak putus sekolah dengan tujuan untuk mencegah anak putus sekolah, memastikan pendidikan yang layak dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Lingkungan masyarakat

mendukung program-program pemerintah dalam mengatasi tantangan anak putus sekolah. Namun, dalam implementasi program, koordinasi di lingkungan instansi antara Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan masih kurang mendalam yang berakibat pada kurangnya keakuratan dan kelengkapan data anak putus sekolah. Pengarahan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bantuan PIP dan mendorong Anak Putus Sekolah untuk ikut PKBM. Meskipun sudah melakukan sosialisasi dan edukasi, masih banyak masyarakat yang kurang mengerti terkait mekanisme PIP. Tindakan yang dilakukan pemerintah Kota Sorong yaitu mendirikan sekolah untuk daerah yang memiliki akses ke sekolah jauh dan terkendala biaya transportasi. Pemberian bantuan PIP untuk masyarakat kurang mampu, peluncuran program pendidikan gratis disemua sekolah negeri, program PKBM yang memberikan solusi bagi yang tidak bisa mengikuti pendidikan formal. Walaupun program PIP ini berjalan dengan baik, masih bnyak masyarakat yang belum menerima manfaat karena terkendala administratif. Pembelajaran yang dilakukan pemerintah Kota Sorong yaitu akan meningkatkan koordinasi antar instansi serta mengevaluasi program PIP yang mengalami keterlambatan pencairan serta pengawasan agar PIP tepat sasaran.

Faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah Kota Sorong dalam mengatasi tantangan anak putus sekolah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu keterbaasan anggaran dalam mendukung berbagai program pendidikan, efektivitas program yang belum maksimal dimana tidak semua siswa mendapat manfaat secara optimal dan tepat sasaran. Perbedaan tingkat keberhasilan strategi diberbagai wilayah serta kurangnya koordinasi antar instansi yang menyebabkan penanganan anak putus sekolah kurang efektif. Faktor eksternal yaitu faktor ekonomi, sosial, budaya, dan faktor masyarakat dan organisasi pendidikan. Faktor ekonomi menjadi penyebab banyak anak yang terpaksa berhenti sekolah karena orang tua tidak mampu membiayai kebutuhan dasar pendidikan. Faktor sosial seperti pergaulan bebas, tekanan teman sebaya, dan kenakalan remaja juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan strategi ini. Faktor budaya juga mempengaruhi angka putus sekolah, terutama di daerah yang masih memegang kuat tradisi yang membatasi kesempatan anak perempuan untuk bersekolah. Sementara itu, faktor masyarakat dan organisasi pendidikan memiliki pengaruh dalam mendukung program-program pemerintah dalam mengatasi tantangan anak putus sekolah di Kota Sorong.

## REFERENSI

BalleoNews. *Ironi di HUT ke-23 Kota Sorong: 674 Anak Putus Sekolah* (dipublikasikan pada tanggal 28 Februari 2023) dan diakses pada 5 Agustus 2024 pukul 14.00 WIT

Kemendikbudristek.. Portal data. (di akases pada tanggal 27 Septrember 2024)  
<https://data.kemdikbud.go.id/dataset/pendidikan-2>

Korain, F., Kaunang, M., & Egetan, M. (2019). *Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya*. Jurnal Administrasi

Publik, 5(86).

- Kusumastuti, Adhi & Khoiron, A. Mustamil. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo. Semarang
- Meysya Ananda Putri. (2024). Strategi Pengelolaan Kebijakan untuk Meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat Kota Bengkulu. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 130–143. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.675>
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar*
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31*
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Siyoto, Sandu dan Sodik, M.A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing. Karanganyar.
- Suprianto. (2023). *Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa Di Desa Simpang Gaung Kabupaten Indragiri Hilir*. Skripsi, Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- Vega, A., Vanezha, I., Agustia, J., Rizqi, M., & Uzdah, R. (2024). Kesetaraan Akses Pendidikan: Analisis Pengimplementasian Nilai Pancasila Dalam Pemerataan Akses Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, 1(2), 44–57.